

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Pembangunan

Lincoln Arsyad (Ekonomi Pembangunan, 2014 : 1-46) mengatakan bahwa ekonomi pembangunan menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas pada akhir decade 1940-an. Strategi pembangunan ini berpusat pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dan mengikuti irama pembangunan yang telah ditargetkan.

Kenyataannya, strategi ini dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang saling mengabaikan (trade-off). Artinya, pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan dalam batas-batas tertentu akan mengabaikan aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya.

Keberhasilan pembangunan yang ditinjau dari tolok ukur ekonomi klasik tersebut sekiranya tidak mampu merefleksikan realitas kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Angka-angka yang tercermin pada GNP tidak cukup representatif dalam mengungkapkan state of mind masyarakat yang sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin lebarnya jurang polarisasi ekonomi seiring dengan pesatnya pertumbuhan.

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh NSB dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah mendasar dari pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan masalah kesenjangan distribusi pendapatan. Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan di NSB itulah yang kini kita kenal sebagai ekonomi pembangunan.

2.2 Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Menurut Hadi Sasana secara umum Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Di era otomomi, Pemerintah memiliki wewenang yang besar untuk mampu mendayagunakan alokasi anggaran dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sasana 2016 : 1)

2.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Ferry Prasetya (dalam Zakaria : 2018) Pengeluaran pemerintah akan mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai pembelian barang dan jasa maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu Teori Makro dan Teori Mikro.

1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya kebijakan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
- c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

2. Teori Mikro

Teori mikro digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor yang mempengaruhi ketersediaan barang publik yang kemudian akan berpengaruh terhadap anggaran belanja negara. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dirumuskan sebagai berikut :

Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S)$$

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vector barang public

X = vector barang swasta

Jika di asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih maka rumusnya menjadi :

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Jika pemuasan dibatasi kendala anggaran maka rumusnya menjadi :

$$P_x X + t B < M_i$$

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

B_i = basis pajak individu 1

M_i = total pendapatan individu 1

T = tarif pajak

2.2.2 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran

Pemerintah

Model ini diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah terdiri dari beberapa tahap pembangunan ekonomi mulai dari tahap awal, menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk berinvestasi sangatlah besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Selanjutnya, pada tahap menengah terjadilah pembangunan ekonomi, pada tahap ini investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar senantiasa berkembang, tetapi peranan investasi swasta juga semakin besar.

Jika investasi swasta terhadap presentase GNP semakin besar maka presentase investasi pemerintah terhadap presentasi GNP akan semakin kecil. Pada tahap ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pengeluaran pemerintah beralih dari penyediaan prasarana menjadi kegiatan sosial.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan wujud nyata pemerintahan dalam usaha meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pendidikan yang layak. Investasi pendidikan mutlak diperlukan sehingga pemerintah harus merancang sistem dan sarana pendidikan yang baik. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dapat dialokasikan dengan cara memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata pemerintah untuk menyediakan pelayanan pendidikan yaitu dengan penyediaan dana sebesar 20% dari total APBN. (Kahang *et al* : 2016)

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu

menyelesaikan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat, maka semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

2.2.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Menurut Kahang pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan merupakan upaya pemenuhan satu hak dasar rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat akan menyebabkan kualitas manusia yang rendah dan kondisi mental yang terbelakang.

Menurut UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan yang dialokasikan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji. Sedangkan, besar anggaran kesehatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan minimal 10 persen dari total APBD di luar gaji.

(Kahang *et al* : 2016)

2.3 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang sering dikenal dengan *Human Resource Management* merupakan aset penting sebuah organisasi yang tidak hanya diikutsertakan dalam filosofi organisasi atau perusahaan tetapi juga dalam proses perencanaan strategis. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah pendekatan yang koherens dan komprehensif terhadap sebuah pekerjaan ataupun pengembangan manusia dalam sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia lebih terkonsentrasi terhadap bagaimana seluruh aspek dalam manusia harus dikembangkan dan diorganisir dengan baik. (Armstrong : 2014)

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut *Werther & Davis* (dalam Hosain : 2014) Sumber daya manusia adalah pegawai yang sanggup mencapai tujuan-tujuan sebuah organisasi. Dimensi pokok sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah hasil kontribusi yang nantinya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidup manusia itu sendiri.

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi dimana sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dengan melaksanakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. (*Schuler et al* : 2014)

Manajemen sumber daya manusia menurut Gary Dessler adalah kebijakan dalam menggerakkan sumber daya manusia atau aspek-aspek terkait posisi manajemen di dalam sumber daya manusia yang mencakup kegiatan perekrutan, penyingkiran, pelatihan, pemberian penghargaan dan penilaian. (Dessler : 2016)

2.4 Konsep Manajemen Modal Manusia (*Human Capital Management*)

Menurut Michael Armstrong *Human Capital Management* merupakan pengembangan baru dari *human resource management* (HRM), dimana perbedaannya terletak pada filosofi dasar yang melekat pada kedua pendekatan tersebut. Pendekatan human capital merupakan suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu asset yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. (Armstrong : 2014)

Human capital lebih menekankan pada pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam organisasi perusahaan dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses, yang pada akhirnya dapat menghasilkan *value* yang lebih bagi perusahaan.

Menurut Larkan (dalam Sukoco : 2017), "*Human Capital* lahir didasari oleh fenomena bahwa pada abad 21 ini kesadaran manajemen perusahaan dalam pengelolaan SDM semakin tinggi. Perusahaan- perusahaan mulai menyadari bahwa kinerja perusahaan bukan hanya ditentukan oleh capital yang berupa finansial, mesin, teknologi, dan modal tetap, melainkan terutama dipengaruhi oleh intangible capital, yaitu sumber daya manusia (SDM)".

2.4.1 Teori Investasi Modal Manusia (*Human Capital Investment Theory*)

Investasi dalam modal manusia (*Human Capital Investment*) adalah kumpulan keseluruhan desain yang digunakan untuk mengembangkan agen-agen perubahan baik di lingkungan belajar ataupun komunitas. *Human Capital Investment* merupakan strategi dalam mengatur investasi uang, sumber daya, waktu dan usaha kedalam suatu kesatuan pengembangan yang sistematis dan memenuhi syarat. (Acemoglu *et al* : 2014)

Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai *Human Capital Investment* menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Modal manusia secara langsung berguna dalam proses produksi, terlebih modal manusia dapat meningkatkan produktivitas pekerja dalam mpo
2. Mengerjakan semua tugas, meskipun dalam tugas, organisasi, dan situasi yang berbeda sekalipun. (Gardener)
3. Modal manusia dipandang sebagai kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. (Schultz/Nelson-Phelps)
4. Modal manusia adalah kemampuan untuk bekerja dalam organisasi, taat terhadap perintah, dan beradaptasi dengan kehidupan secara hierarkis di lingkungan yang kapitalis. (Bowles-Gintis)

Menurut London School of Economics kemakmuran ekonomi dan fungsi suatu Negara tergantung pada fisik dan stok modal sumber daya manusia didalamnya. *Human Capital Investment* menggambarkan bagaimana manusia

dapat meningkatkan kemakuran ekonominya sendiri. Teori Modal Manusia menekankan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja dengan meningkatkan level pengetahuan produktivitas ekonomi.

2.4.2 Komponen *Human Capital*

Menurut Andrew Mayo (dalam Sukoco : 2017) bahwa : “Human Capital memiliki lima komponen yang memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan human capital perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaan. Kelima komponen Human Capital tersebut adalah :

- *Individual capability*
- *Individual motivation*
- *The organization climate*
- *Workgroup effectiveness*
- *Leadership*



Gambar 2.1 Komponen *Human Capital*

1. *Individual Capability*

Kecakapan individu dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu kecakapan nyata (*actual ability*) dan kecakapan potensial (*potential ability*). Kecakapan nyata yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar (*achievement* atau prestasi), yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Kecakapan potensial merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan.

2. *Individual Motivation*

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008:61), “Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan”.

3. *The Organization Climate*

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.

4. *Workgroup Effectiveness*

Efektifitas tim kerja didasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka

5. *Leadership*

Menurut Tannebaum, Weschler and Nassarik (dalam Abdussalam 2008:18) kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.

2.5 Konsep Pembangunan Manusia

Pada tahun 1996, konsep mengenai IPM pertama kali dikemukakan dan dipublikasi oleh UNDP melalui *Human Development Report*. Konsep IPM ini kemudian berlanjut dan berkembang setiap tahunnya. Pembangunan manusia diartikan sebagai proses memperluas pilihan masyarakat untuk meningkatkan aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Terdapat empat pilar utama dalam

pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. (Kahang *et al* : 2016)

Kata kunci konsep pembangunan manusia menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pilihan terutama dalam perolehan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dibentuk oleh tiga hal yaitu umur panjang dan sehat; pengetahuan yang cukup dan kehidupan yang layak.
2. Pembangunan manusia ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk masyarakat agar dapat menikmati umur yang panjang, sehat, dan menjalankan produktivitas kehidupan dengan baik.
3. Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan hidup bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, manusia diposisikan sebagai subjek dan motor penggerak pembangunan nasional sehingga diarahkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Masyarakat yang terlibat akan digerakan secara agregatif untuk memberikan kontribusi nyata dalam proses pembangunan sehingga pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang manfaatnya akan dirasakan bersama dan merata serta adil bagi masyarakat itu sendiri. (Malik : 2014)

Menurut Khalid Malik Produktivitas masyarakat merupakan modal utama pertumbuhan negara, dan partisipasi masyarakat merupakan pondasi pembangunannya. Oleh karena itu, strategi pembangunan pembangunan manusia merupakan strategi yang paling akomodatif dalam proses pemberdayaan suatu negara agar negara tersebut dapat tetap tumbuh dan berkembang. (Malik : 2014)

2.5.1 Pengukuran Pembangunan Manusia

UNDP menuturkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur untuk melihat capaian pambangunan manusia yang dilihat dari berbagai basis komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar sebagai berikut :

1. Umur panjang dan hidup sehat

Usia hidup diukur dengan usia harapan hidup (e_0) yang dihitung dengan metode Brass, varian Trussel berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

2. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data dari Susenas Kor. Harapan lama sekolah difenisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan

menggunakan variabel tingkat/kelas yang pernah/sedang dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan.

3. Standar hidup layak

Standar hidup layak diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*).

Diawal laporan tahun pertama, UNDP melakukan pengukuran kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya pengukuran dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Terakhir digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita untuk mengukur dimensi standar hidup yang layak. (Astri *et al* 2013 : 78)

2.5.2 Formula Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, yaitu dengan tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan taraf pendidikan dan peningkatan taraf derajat kesehatan.

Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Suharto, (2010: 80) dihitung sebagai berikut sebagai berikut⁵:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{X (1)} + \text{X (2)} + \text{X (3)})$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat dihitung sebagai berikut⁷

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]}$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$

$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada tabel berikut¹ :

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Catatan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.5.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Manfaat utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masyarakat adalah sebagai berikut: (Badan Pusat Statistik : 2015)

1. IPM adalah indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya dalam membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk.
2. IPM digunakan untuk menentukan level pembangunan suatu wilayah ataupun Negara
3. IPM merupakan data strategis dalam menilai kinerja pemerintahan, serta digunakan sebagai alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.5.4 Pengelompokan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui beberapa kategori tingkatan IPM sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

IPM	Kriteria
<60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat tinggi

2.6 Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Sejumlah penelitian telah mengungkapkan terdapatnya korelasi positif antara pendidikan dengan produktivitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang baik dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara pun meningkatkan kualitas manusia didalamnya. Pendidikan berperan penting dalam proses pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan dan tenaga kerja yang berkualitas. (Sudarsana : 2016)

Pendidikan dalam arti luas akan mengubah manusia tidak hanya sebagai “*human factors*” tetapi juga sebagai “*human capital*”, yang di dalamnya termuat unsur manusia secara fisik, keterampilan-keterampilan, kemampuan kognitif, keuletan, ketakwaan, motivasi, kepribadian dan loyalitas.

Sudarsana menuturkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar ekonomi pendidikan seperti Komarov, Schultz, Bouman, Harbison dan Myer, menunjukkan bahwa tingginya rata-rata pendidikan penduduk berkorelasi secara linier dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Fakta ini membuktikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci utama bagi percepatan dan pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan

kesejahteraan pada khususnya

2.7 Kesehatan dan Pembangunan Manusia

Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, kesehatan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam pengukuran IPM. Tingkat kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup masyarakat.

IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) merupakan indeks komposit yang dirumuskan oleh 24 indikator kesehatan berbasis komunitas. IPKM akan menjadi indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. IPKM ini dirumuskan berdasarkan data kesehatan berbasis komunitas yang dilaksanakan pada tahun 2007-2008 sebagai berikut :

- Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar)
- Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)
- Survei Podes (Potensi Desa)

IPKM dianggap perlu dikembangkan karena memiliki berbagai manfaat sebagai :

1. Indikator penentu peringkat Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat.
2. Bahan advokasi untuk Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota agar terpacu untuk meningkatkan peringkatnya, sehingga sumber daya dan program kesehatan menjadi prioritas pembangunan.

3. Salah satu kriteria penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah (Provinsi maupun Kabupaten / Kota) dan dari Provinsi ke Kabupaten / Kota

IPKM dapat digunakan untuk melihat karakteristik kesehatan Kabupaten / Kota. Dengan menggunakan data dari tiga survei (Riskesdas, Susenas, dan Podes), maa selanjutnya dilakukan analisis agregat pada tingkat Kabupaten / Kota. Variabel yang digunakan pada analisis awal pembentukan IPKM adalah sebagai berikut :

- Variabel Susenas yaitu akses air bersih, akses sanitasi lingkungan, dukungan variabel perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Variabel Riskesdas yaitu penyakit, pemanfaatan fasilitas kesehatan, ketanggapan, kesehatan balita, perilaku, status gizi, sanitasi lingkungan.
- Variabel Podes yaitu jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan.

Dengan adanya pengembangan IPKM dapat memperjelas masalah kesehatan di tiap wilayah, sehingga program intervensi bisa lebih jelas dan terarah. Berbasis indikator yang dikembangkan oleh IPKM, maka pemanfaatan IPKM dapat beragam, seperti :

1. Penggunaan indikator IPKM secara keseluruhan akan menunjukan daerah mana yang memiliki masalah kesehatan terberat sehingga dapat mempertaja program mana saja yang harus di intervensi.

2. Penggunaan salah satu indikator dalam IPKM akan menghasilkan penajaman lokasi Kab/ Kota yang menjadi sasaran.
3. IPKM dapat dijadikan sebagai salah satu parameter perhitungan alokasi bantuan pusat ke Kab/ Kota secara berkeadilan.

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

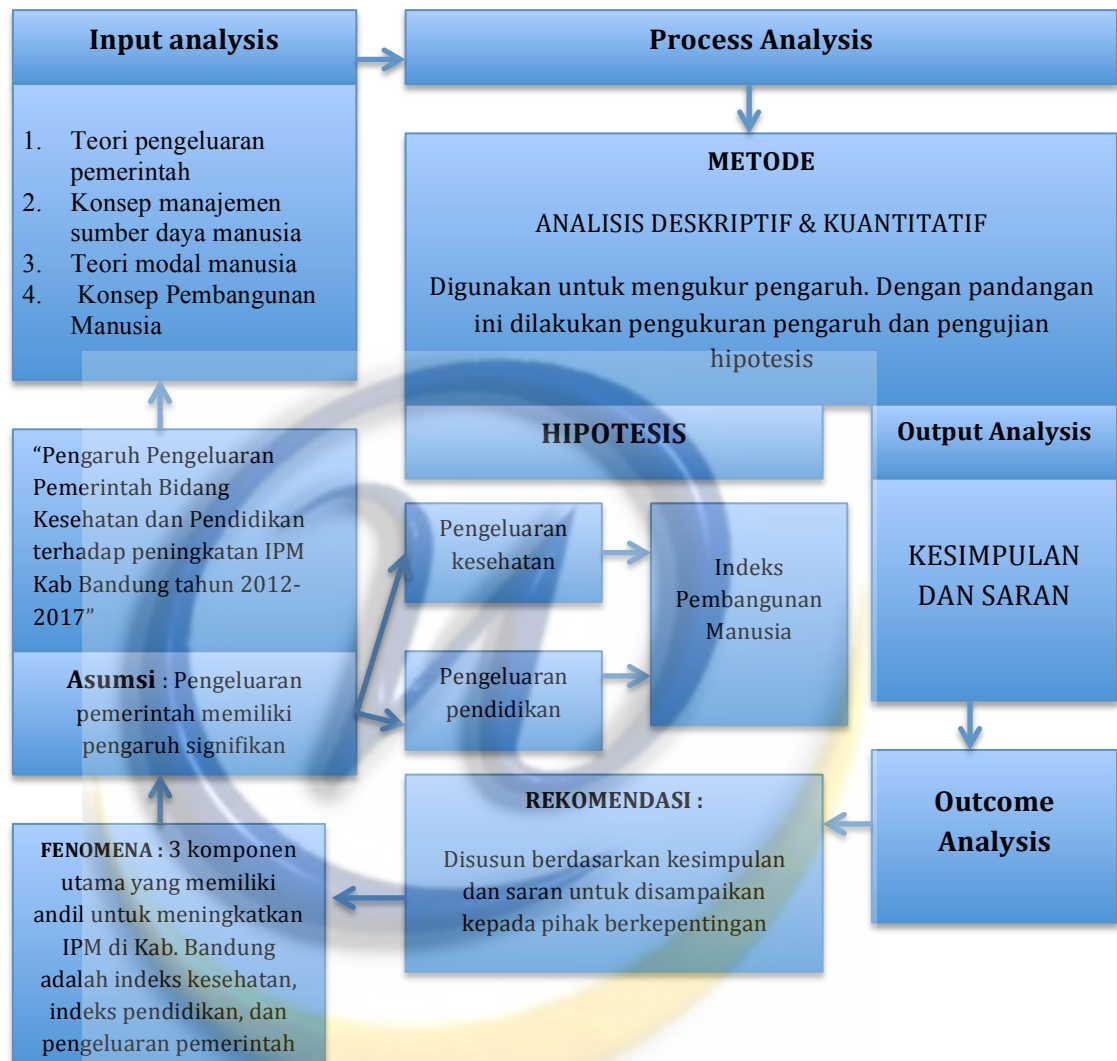
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
M. Zahari MS dan Sudirman. 2017	The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province	<p>From the analysis of simultaneous statistical test (F), it can be concluded that the value of F arithmetic is greater than the F table value ($4.824 > 3.89$), then there is a positive influence between the independent variables (Government expenditure in education and government expenditure in health sector) To the dependent variable (Human Development Index in Jambi Province) with significance level of 0.029. From the result of Partial Statistic Test (t), it can be concluded that the value of t count is smaller than the value of t table on the variable of government expenditure in the field of education ($0,431 < 2,179$), with significance level 0,674 so there is no influence between government expenditure in field Education on the human development index in Jambi Province.</p> <p>While the government expenditure variable in the health of t value is bigger than t table equal to ($3,057 > 2,179$) with significance level 0,010 hence government expenditure in health sector there is positive and significant influence to index of human development in Jambi province. The coefficient value of regression variable of government expenditure in the</p>

		field of Health (X2) of 0,042 can be interpreted if government expenditures in the field of Health rose 1 percent then the human development index will rise by 0.042
Kurnia Maharani dan Sri Isnowati. 2014	Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi terhadap Perumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah	Investasi swasta parsial, investasi pemerintah, belanja pemerintah, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sementara variabel keterbukaan ekonomi secara statistik signifikan, efek negatif pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Diambil bersama-sama investasi swasta, investasi pemerintah, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto. 2016	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur	Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur
Nur Baeti 2013	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

<p>Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara.</p> <p>2013</p>	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia</p>	<p>Terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara serempak.</p> <p>Kesimpulan yang sama terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. Yang didapat adalah 0,004 dari hasil tersebut bahwa sig. lebih kecil dari α maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM ($t_{hitung} 3,023 > t_{tabel} 1,674116$), namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM ($t_{hitung} 0,412 < t_{tabel} 1,674116$).</p> <p>Selain itu, terlihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 0,186, artinya seluruh variabel bebas (pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan) dapat menjelaskan variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 18,6%. Sedangkan sisanya sebesar 81,4% diterangkan oleh variabel lain.</p>
---	---	---

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

1. Komponen-komponen Input Analisis mencakup fenomena pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten bandung, judul penelitian yang lahir dari asumsi, dan teori-teori yang menjadi rujukan penyusunan konsep operasional variabel penelitian, yaitu Teori pengeluaran

pemerintah, konsep manajemen sumber daya manusia, Teori modal manusia, dan Konsep Pembangunan Manusia.

2. Dari input analisis yang demikian itu dilakukan Process Analysis dengan menggunakan Metode Analisis Kuantitatif. Metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017 dalam rangka pengujian Hipotesis.
3. Outputs Analysis metode analisis data tersebut adalah pokok-pokok Kesimpulan dan Saran.
4. Outcomes Analysis adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan pokok-pokok kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan hasil penelitian.
5. Dengan kerangka pemikiran yang demikian itu, maka diasumsikan bahwa terdapat pengaruh positif (searah) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017

2.9 Hipotesis Penelitian

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012 – 2017

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012 – 2017

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012 – 2017

